

Hambatan yang tak Terasa: Wacana-Wacana Bias Gender dalam Masyarakat Bali Dewasa Ini

Ni Wayan Sartini

Pendahuluan

Gender dapat dilihat dari berbagai perspektif dan merupakan topik yang "seksi" terbukti selalu menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang. Studi atau kajian tentang gender dalam bahasa sebenarnya bukan hal yang baru di bidang linguistik seperti dalam sociolinguistik, pragmatik, maupun analisis wacana. Dalam mengaitkan bahasa dan gender para ahli bahasa dan ilmu-ilmu sosial lainnya mempermasalahkan adanya ketimpangan gender dalam penggunaan bahasa sehari-hari, baik lisan maupun tertulis (Kuntjara, 2012:187).

Jika pada awalnya para peneliti bahasa dan gender lebih terpaku pada sistem dan struktur bahasanya saja sebagai variabel tersendiri, lama kelamaan mereka juga melihatnya dalam kaitannya dengan konteks sosial yang ada. Dalam hal ini, semakin tampak bahwa ketimpangan gender dalam bahasa ternyata banyak disebabkan oleh kondisi sosial masyarakatnya dan akan berubah sejalan dengan perubahan sosial yang ada. Oleh sebab itu, para peneliti percaya bahwa studi gender dalam bahasa tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengikutsertakan pengalaman sosial budaya masyarakatnya dan hanya dapat dipahami dalam konteks itu. Dengan kajian seperti itu akan diperoleh banyak hal tentang persoalan gender, salah satunya adalah kesetaraan gender (*gender equality*).

Kesetaraan gender merupakan isu yang sangat penting dalam memajukan dan memperkuat kemampuan sebuah negara untuk berkembang. Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender sebenarnya masih menjadi

persoalan yang belum terpecahkan dan memerlukan usaha-usaha yang lebih komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal. Hal ini penting karena kesetaraan gender menempati urutan ke-5 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB periode 2015-2030. Untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal tentu bukan hal mudah karena banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam hal ini. Kendala dan tantangan dapat berasal dari faktor internal yaitu diri perempuan itu sendiri dan faktor eksternal dari laki-laki serta masyarakat secara umum.

Berbicara tentang kesetaraan gender tidak lepas dari eksistensi perempuan yang menyangkut diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir agama (Fakih, 1996:15). Contohnya adalah banyak suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali dan sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak pria terhadap wanita.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Pencapaian kesetaraan gender akan berdampak pada keadilan gender yaitu suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Ketika terjadi diskriminasi dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat maka timbullah ketidaksetaraan gender. Hal ini dijumpai di berbagai budaya yang ada di Indonesia tidak terkecuali pada budaya Bali. Dalam masyarakat Bali, masih ada persoalan menyangkut ketidaksetaraan gender seperti tidak mengikutkan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Perempuan Bali memahami kesetaraan gender merujuk pada pemahaman terhadap kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia,

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Banyak kendala yang dihadapi masyarakat Bali dalam mencapai kesetaraan gender. Salah satunya adalah banyaknya wacana di masyarakat yang menghambat kesetaraan gender. Wacana-wacana ini sudah berakar dan melekat erat pada kehidupan masyarakat Bali. Walaupun secara umum saat ini lanskap kesetaraan gender sudah mulai nampak dipermukaan namun sebenarnya hambatan dan kendala masih ada dan menjadi semacam mitos yang mengakar pada masyarakat Bali. Gerak perempuan Bali untuk melangkah lebih maju terkadang dibatasi oleh wacana-wacana yang sulit didobrak. Perempuan Bali seolah-olah dibelenggu oleh wacana-wacana dalam pergulatan gender. Misalnya; beban mengurus rumah tangga sepenuhnya ada pada perempuan.

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini bertujuan membahas wacana-wacana yang ada dan berkembang di masyarakat Bali yang tanpa disadari akan menghambat kesetaraan gender. Wacana dalam hal ini merujuk pada tuturan atau ungkapan-ungkapan yang diucapkan baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh masyarakat umum yang berpotensi menghambat kesetaraan gender. Dari wacana-wacana tersebut dapat dipahami bagaimana sebenarnya perempuan Bali memosisikan dirinya dan bagaimana masyarakat umum menempatkan perempuan dalam struktur masyarakat Bali.

Kajian Pustaka

Kajian-kajian tentang kesetaraan gender dalam masyarakat Bali telah banyak dilakukan antara lain oleh Rahmawati (2015) dalam penelitiannya mengenai perempuan Bali dalam pergulatan gender. Penelitian Rahmawati menyimpulkan bahwa budaya patrilineal khususnya yang memengaruhi hukum adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, menurut Rahmawati (2015) perempuan Bali memandang kerja

sebagai suatu persembahan (*yadnya*) sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban, walaupun sebenarnya perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya.

Isu lain tentang bias gender, dibahas oleh Sartini (2020) dalam penelitian tentang ekspresi verbal masyarakat Bali terhadap kelahiran bayi. Dengan mengambil data pada media sosial berdasarkan kosa kata yang digunakan dalam mengekspresikan kelahiran bayi, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat Bali dari sejak kelahiran bayi telah menunjukkan sikap yang berbeda terhadap kelahiran bayi perempuan. Dari ekspresi verbal yang disampaikan, masyarakat Bali cenderung memberikan ekspresi verbal yang positif terhadap kelahiran bayi laki-laki dibandingkan dengan bayi perempuan. Hal ini merefleksikan bias gender, dimana posisi perempuan dalam masyarakat Bali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang lebih rendah posisinya dibandingkan dengan laki-laki.

Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan gender adalah "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global" oleh Arjani (2008), kemudian Parmiti (2017) meneliti tentang "Kesetaraan Gender dan Pergulatan Status Sosial Wanita Bali dan Konstelasi Politik Praktis", Nur Hasan dan Robby Maulana (2014) meneliti tentang "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali"; kemudian Adnyani (2016) melakukan penelitian tentang "Bentuk Perkawinan Matriarki di beberapa daerah di provinsi Bali dan mengaitkannya dengan bentuk perkawinan. Dari berbagai penelitian yang telah ada tentang kesetaraan gender tersebut; belum ada yang menganalisis tentang wacana-wacana yang menghambat kesetaraan gender di masyarakat Bali. Oleh sebab itu, tulisan ini membahas wacana-wacana penghambat kesetaraan gender yang ada di masyarakat tetapi tidak dirasakan sebagai masalah dan dianggap sebagai ungkapan yang biasa dan diterima begitu saja.

Bahasa dan Gender (*Language and Gender*)

Bahasa merupakan sebuah dinamika yang dapat merefleksikan budaya masyarakatnya. Oleh sebab itu, berbagai aspek dapat diketahui dari penggunaan bahasa. Salah satunya adalah adanya ketidaksetaraan gender dalam suatu budaya. Banyak bahasa menunjukkan gambaran gender yang terkandung dalam kata-kata dan gramatika serta bentuk-bentuk linguistik khusus yang dapat mengekspresikan gambaran gender secara bervariasi. Bagaimana persepsi dan pandangan suatu masyarakat terhadap gender akan terkodekan dalam bahasanya. Bahasa juga dapat menggambarkan perbedaan posisi laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda dalam suatu budaya, tingkat perbedaan tersebut terpola dalam bentuk-bentuk linguistik termasuk dalam wacana-wacana budaya.

Dalam beberapa bahasa ada aturan-aturan bentuk eksklusif gender yang berlaku mengarah pada perbedaan yang tetap antara laki-laki dan perempuan (Bonvillain, 2003:239). Namun dalam pola yang lebih luas, pilihan (preferensi) linguistik, diperlihatkan melalui frekuensi dalam penggunaan berbagai variasi stilistik yang meliputi bunyi-bunyi, kata-kata, dan konstruksi gramatika.

Eksistensi perbedaan ujaran laki-laki dan perempuan didasarkan pada aturan sosial pada laki-laki dan perempuan dan tingkat ketidaksamaan dalam hubungan mereka. Dalam masyarakat dimana laki-laki lebih prestisius dan dihormati dari perempuan, bahasa dan gaya yang digunakan lebih rendah daripada laki-laki. Pada masyarakat di mana ada kesetaraan gender perilaku komunikatif memberikan nilai dan makna bagi kedua gender. Bahasa dengan demikian sebagai alat dalam mengungkapkan model budaya laki-laki dan perempuan. Model itu berisi gambaran yang tepat dan perilaku yang baik dengan merefleksikan bentuk dan memperkuat melalui penggunaan simbol-simbol gender budaya yang tertanam (Bonvillain, 2003:239).

Linguistik Kultural

Linguistik kultural atau disebut juga etnolinguistik adalah sebuah kajian multidisiplin yang mengkaji hubungan antara bahasa, budaya dan konseptualisasi (Palmer, 1996, Sharifian,

2011). Kajian ini menggali secara eksplisit konseptualisasi yang memiliki basis budaya yang dikodekan dan dikomunikasikan lewat fitur-fitur bahasa manusia. Fitur-fitur itu berupa ekspresi verbal seperti kosa-kata, frasa, klausa, wacana dan unit lingual lainnya. Melalui bahasa merupakan jalan yang paling mudah untuk memahami budaya, studi bahasa suatu masyarakat adalah titik masuk sekaligus aspek utama dalam kajian Linguistik Kultural. Oleh sebab itu, bahasa merupakan jalan yang paling mudah untuk sampai pada sistem pengetahuan suatu masyarakat, yang isinya antara lain klasifikasi-klasifikasi, aturan-aturan, prinsip-prinsip, pandangan hidup, filosofi, nilai-nilai dan sebagainya.

Sejalan dengan Linguistik Kultural, kajian etnolinguistik secara mikrolinguistik mempelajari bahasa dalam konteks budaya, dan secara interpretatif mencoba mencari makna tersembunyi yang ada di balik pemakaian bahasa dan mengupas bahasa untuk mendapatkan pemahaman budaya yang bermula dari kebahasaan (Rais, 2017:52). Oleh karena itu secara mikrolinguistik data yang dipakai adalah berupa kosa-kata, frasa, struktur kalimat, bentuk-bentuk kalimat, regisiter, dan sejenisnya (Kridalaksana, 2008:59) termasuk juga wacana.

Wacana-wacana yang disampaikan oleh perempuan atau masyarakat Bali pada umumnya, mengandung makna yang dapat merefleksikan konteks sosial budaya yang lebih luas. Oleh sebab itu, tulisan ini dapat dipandang sebagai kajian linguistik kultural atau etnolinguistik yang memandang bahwa bahasa dan budaya memiliki kaitan yang sangat erat karena penggunaan bahasa adalah cermin dari budaya penuturnya. Wacana-wacana yang ditujukan kepada perempuan merupakan fakta bahasa yang mengandung nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Analisis Wacana Kritis

Dalam kaitan dengan analisis wacana kritis, wacana dilihat sebagai bentuk pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk praktik sosial. Praktik wacana dapat menampilkan efek ideologi, memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan,

kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu dipresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Melalui wacana, sebagai skala mikro dapat mencerminkan skala makro yaitu konteks sosial budaya masyarakat Bali seperti keadaan rasis, seksis atau ketimpangan dari kehidupan sosial yang dipandang sebagai suatu hal yang biasa (wajar) (alamiah) (*common sense*) dan saat ini memang seperti itu adanya.

Foucault (1982) menyatakan bahwa wacana merupakan sebuah teks maka kajian mengenai wacana ini dapat dilihat dari relasi antara teks mikro dan teks makro. Berkaitan dengan relasi teks mikro dan makro, Fairclough (1995) menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro dan berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, kemudian mengkombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial.

Wacana merupakan produk budaya yang diproduksi oleh anggota suatu masyarakat. Konsep wacana dalam tulisan ini sesuai dengan konsep wacana yang disampaikan oleh Mills (1997) yang mengacu pada pendapat Foucault (1982) bahwa wacana diartikan sebagai domain semua pernyataan (*statement*) yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Analisis wacana dalam tulisan ini berfokus pada struktur alamiah yang terdapat pada bahasa lisan sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar dan ucapan-ucapan (Crystal, 1987). Dengan demikian pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan secara lisan baik oleh perempuan Bali maupun masyarakat umum dapat digolongkan sebagai bentuk wacana.

Konteks Kajian

Kaitan antara bahasa dan budaya, dalam arti sebagai refleksi dari sistem budaya masyarakatnya merupakan fokus dari kajian ini. Hal ini sesuai dengan Fairclough (1995) bahwa wacana, tuturan, atau ucapan adalah sistem bahasa yang diproduksi oleh

penuturnya dalam konteks budaya. Dalam tulisan ini, wacana yang diungkapkan oleh perempuan Bali atau masyarakat Bali pada umumnya dapat dipandang sebagai refleksi dari budaya Bali. Bagaimana perempuan Bali itu sendiri menempatkan dirinya dan bagaimana masyarakat memandang perempuan akan terkodekan dalam struktur bahasa yang diproduksi lewat bentuk wacana atau tuturan. Kesetaraan gender juga dapat tersematkan dalam struktur bahasa yang diungkapkan oleh perempuan Bali atau masyarakat Bali secara umum. Bahasa sebagai fakta sosial dapat menggambarkan banyak hal yang berakaitan dengan struktur sosial dan budaya masyarakat tidak terkecuali masyarakat dan budaya Bali.

Pembahasan

Wacana-wacana yang hidup dan berkembang pada masyarakat Bali tidak pernah disadari bahwa hal itu berperan besar dalam menghambat kesetaraan gender. Wacana-wacana itu dianggap sebagai suatu keniscayaan dan tidak perlu diperdebatkan. Padahal, untuk mencapai kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan wacana-wacana yang berkembang tersebut seharusnya tidak dibiarkan terus-menerus mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dalam pembahasan ini akan diuraikan wacana-wacana yang menghambat kesetaraan gender sebagai berikut.

Wacana Penghambat Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan

Kalau ditelusuri secara cermat, banyak wacana yang dapat menghambat usaha mewujudkan kesetaraan gender dalam pemerolehan pendidikan khususnya bagi perempuan. Wacana-wacana ini terkadang dianggap sebagai suatu hal biasa yang tidak perlu diperdebatkan, padahal sangat memengaruhi mind set atau pola pikir masyarakat yang tanpa disadari menjadi pola perilaku sesuai dengan konten wacana. Namun, dalam konteks kajian gender justru hal ini berdampak serius terhadap kesetaraan gender. Berikut ini adalah wacana-wacana dalam hal memperoleh pendidikan.

Tabel 1. Bentuk Wacana Penghambat Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

No.	Bentuk Wacana	Makna
1	<i>Kanggoang masekolah amonto dogen, meme barengin medagang di peken.</i>	Cukup bersekolah segitu saja, bantu Ibu berjualan di pasar.
2	<i>Ngudiang anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nyanan masih kal ke paon.</i>	Mengapa anak perempuan bersekolah tinggi-tinggi, nanti juga akan ke dapur.
3	<i>Anggon gene mesekolah joh-joh, men suba nganten sing meanggo ilmune.</i>	Untuk apa bersekolah jauh-jauh, kalau sudah menikah ilmunya juga tidak dipakai.
4	<i>Ngengken anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nak len kal maan.</i>	Untuk apa anak perempuan bersekolah tinggi-tinggi, orang lain nanti yang dapat.
5	<i>Kuliah deket-deket sini aja, ga usah jauh-jauh kuliah. Nyanan ada apa2 buin repot. Awak luh!</i>	Kuliah dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh kuliah. Nanti kalau ada apa-apa nanti repot. Kamu kan perempuan!

Data (1-5) adalah wacana yang ditujukan kepada perempuan dalam kaitannya dengan pemerolehan pendidikan. Dari data tersebut terlihat diksi yang secara khusus menjadi label kaum perempuan yaitu ; *peken* 'pasar', *paon* 'dapur', *nganten* 'kawin', *awak luh* 'perempuan'. Data tersebut merupakan wacana yang menghambat kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan. Walaupun masyarakat Bali saat ini sudah tergolong masyarakat yang modern namun wacana-wacana atau ucapan tersebut masih berkembang pada lapisan-lapisan masyarakat tertentu. Memang tidak dipungkiri saat ini telah banyak keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk perempuan, namun tidak dinafikan juga bahwa masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi.

Data (1) "*Kanggoang masekolah amonto dogen, meme barengin medagang di peken*" merupakan ungkapan yang disampaikan seorang ibu kepada anaknya yang ingin dalam suatu dialog ketika si anak minta izin melanjutkan kuliah. Namun ibunya tidak mengizinkan anak perempuannya untuk melanjutkan kuliah dan minta si anak membantu ibunya berjualan di pasar. Kalau diperhatikan wacana ini diungkapkan oleh seorang perempuan (ibu) kepada putrinya, menunjukkan bahwa wacana

ketidaksetaraan gender itu juga muncul dari perempuan itu sendiri. Terlepas dari faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kondisi tersebut, yang jelas hambatan dan kendala kesetaraan gender juga diproduksi oleh perempuan.

Data (2) *Ngudiang anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nyanan masih kal ke paon*; menunjukkan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya nanti pasti ke dapur. Dapur di sini adalah area domestik yang identik dengan aktivitas perempuan seperti rumah tangga. Pada dasarnya dapur itu adalah area untuk semua jenis kelamin. Namun dalam budaya masyarakat Indonesia dan juga Bali, dapur identik dengan area perempuan sehingga perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi yang ujung-ujungnya ke dapur juga. Tentu hal ini tidak benar karena saat ini banyak perempuan sukses dengan kedudukan tinggi dapat mengelola rumah tangga (dapur) dengan baik. Dengan pendidikan yang tinggi seorang perempuan dapat mengelola urusan domestik dengan baik. Data (2) ini bagi perempuan Bali tentu menjadi hambatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi karena seolah-olah pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan.

Data berikutnya (3-5) adalah wacana-wacana yang ditujukan kepada perempuan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada intinya wacana-wacana tersebut mengandung makna bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi atau paling tidak menempuh studi lanjut. Perempuan nantinya akan berkuat dengan sektor domestik yang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Pendidikan untuk perempuan dianggap tidak penting karena posisinya sebagai kelas subordinasi dari laki-laki. Tentu hal ini sangat menghambat terjadinya kesetaraan gender dalam masyarakat Bali.

Walaupun saat ini telah banyak perempuan Bali yang berpendidikan tinggi, namun wacana-wacana tersebut pada lapisan masyarakat tertentu masih ada. Oleh sebab itu dampaknya tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Bali yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki. Banyak anak-anak perempuan yang hanya lulusan setingkat SMP atau SMA terserap ke dalam

industri garmen (konveksi) yang hanya membutuhkan tenaga dan sedikit ketrampilan menjahit.

Dalam sektor ekonomi, banyak anak perempuan menjadi buruh angkut belanjaan di pasar-pasar. Hal tersebut sebagai akibat kurangnya pendidikan formal yang memadai untuk kaum perempuan. Walaupun sekarang dalam lingkup gender masyarakat Bali telah banyak kaum perempuan menempati posisi strategis sebagai *decision marker* dan banyak yang memiliki gelar mulai dari tingkat sarjana, master, dan doktor bahkan profesor, itu hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang ada. Sangat kontradiktif dengan gemerlap Bali sebagai tujuan wisata internasional (sebelum pandemi covid-19) seharusnya membuat seluruh aspek kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Data (4) *Ngengken anak luh mesekolah tegeh-tegeh, nak len kal maan;*

'Untuk apa anak perempuan bersekolah tinggi-tinggi, orang lain nanti yang dapat' merupakan wacana yang juga sering muncul di masyarakat. Konteks ungkapan ini adalah ketika ada pihak-pihak yang memandang bahwa pendidikan tinggi yang dibekali oleh pihak keluarga perempuan akan dinikmati orang lain yaitu pihak keluarga laki-laki. Wacana semacam ini masih sering dijumpai pada masyarakat Bali. Membekali pendidikan kepada perempuan dianggap sebuah kerugian bagi keluarganya, pendidikan untuk perempuan dianggap tidak penting. Hal ini terkait dengan model perkawinan di Bali yang menganut sistem patrilineal.

Dalam kaitan dengan data (4) ada sebuah pepatah di India yang mengatakan bahwa membesarkan anak perempuan sama saja dengan mengairi pohon rindang di halaman orang lain (Mosse, 1996) karena di India perkawinan anak perempuan akan menyedot hampir sebagian kekayaan orang tua berupa mas kawin untuk laki-laki. Namun dengan adanya wacana seperti data (4) menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang tinggi terhadap perempuan dianggap akan yang memetik hasilnya adalah pihak keluarga suaminya (*nak len* 'orang lain'). Tentu saja hal ini tidak benar karena pendidikan yang dimiliki perempuan adalah untuk eksistensinya sendiri dan kesejahteraan

keluarganya ketika dia menikah kelak. Wacana-wacana semacam ini juga menjadi kendala dalam pencapaian kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan bagi perempuan.

Ada yang menarik berkaitan dengan stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah yaitu data (5) *Kuliah dekat-deket sini aja, ga usah jauh-jauh kuliah. Nyanan ada apa2 buin repot. Awak luh!* Dalam teks ini terdapat ada dua makna yaitu (1) membatasi kebebasan perempuan dalam memperoleh pendidikan; (2) yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah yang tidak bisa mandiri dan menjaga dirinya. Wacana-wacana semacam ini secara tidak sadar sebenarnya menghambat kesetaraan gender namun hal itu tidak disadari oleh masyarakat Bali pada umumnya.

Dari wacana yang telah disebutkan di atas, dalam konteks linguistik kebudayaan dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bentuk wacana-wacana tersebut merupakan refleksi dari konteks sosial budaya masyarakat Bali. Nilai budaya terkodekan dalam wacana atau tuturan-tuturan yang diucapkan baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh masyarakat yang ditujukan kepada perempuan. Dalam analisis wacana kritis, teks mikro merupakan cermin dari dan teks makro yaitu konteks sosial budaya masyarakatnya. Data (1-5) adalah teks mikro yang mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat Bali yang menempatkan perempuan sebagai golongan kelas dua sehingga tidak perlu mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga perlu dilindungi dan diawasi. Hal tersebut sebenarnya menjadi kendala menuju kesetaraan gender yang lebih baik.

Pola pikir yang menganggap pendidikan tidak penting bagi perempuan merupakan pola pikir yang memandang perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan (termarjinal). Gramsci (dalam Suryawan, 2010) menyatakan bahwa dalam sebuah tatanan sosial akan selalu ditemukan kelompok-kelompok terpinggirkan, termarjinalkan dan terkucilkan. Proses marginalisasi ini terjadi akibat adanya kekuatan hegemoni yang menganggap mereka sebagai kelompok yang tidak penting dan tidak perlu didengarkan suaranya.

Wacana Penghambat Kesetaraan Gender dalam Pengambil Keputusan.

Wacana berikutnya yang dapat dianggap sebagai penghambat kesetaraan gender adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan apa pun terkadang perempuan tidak dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam sektor publik.

Tabel 2. Bentuk Wacana Penghambat Kesetaraan Gender dalam Pengambil Keputusan

No.	Bentuk Wacana	Makna
1	<i>Awak luh; siepang ibane ento urusan muani-muanine.</i>	Kamu perempuan, diam saja, itu urusan laki-laki.
2	<i>Anak luh sing dadi milu-milu ditu, depang lanang-lanange mutusin.</i>	Perempuan tidak boleh ikut-ikut, biar saja laki-laki yang memutuskan.
3	<i>Ah..Ibu tusing bisa mutusin, Ibu ngudiang, ento ada Bapak, depang Bapak dogen ane mutusin.</i>	Ibu tidak bisa memberikan keputusan, Bapak saja yang memutuskan.
4	<i>Tiang nak neka, ten bani milu-milu ditu (di dalam keluarga laki-laki).</i>	Saya ini pendatang, tidak berani ikut-ikut di situ.
5	<i>Ngoyong gen jumah, panake runguang, de be misi megae.</i>	Tinggal di rumah saja, merawat anak, jangan bekerja.
6	<i>Banggiang lanang-lanange ngajeng dumum, irage luh-luhe durian.</i>	Biarkan para lelaki makan lebih dulu, kita perempuan belakangan (makan).

Data (1 -- 4) di atas, merupakan sebagian kecil data yang diperoleh karena masih banyak wacana-wacana lain yang berkembang di masyarakat yang dianggap sebagai ungkapan biasa saja. Data (5 dan 6) adalah wacana yang ditemukan ketika ada pertemuan atau rapat untuk memutuskan tentang rangkaian upacara adat yang akan dilaksanakan dalam sebuah masyarakat *dadia* atau *kawitan*. Dalam hal memutuskan sesuatu terkadang perempuan tidak dilibatkan walaupun yang melaksanakan keputusan tersebut adalah perempuan. Tentu tidak semua terjadi seperti itu, karena pada saat ini dengan semakin gencarnya gerakan kesetaraan gender, saat ini perempuan telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam segala kegiatan. Walaupun begitu, masih ada lapisan-lapisan masyarakat yang tidak memberi porsi perempuan Bali dalam pengambilan keputusan.

Penekanan frasa "*awak luh*" "*anak luh*" pada data tersebut menunjukkan bahwa perempuan diharapkan tahu diri akan eksistensinya sebagai kelompok masyarakat kelas dua yang tidak boleh ikut memegang peranan utama dalam konteks pengambilan keputusan. Kemudian kalimat "*sie pang ibane*" 'kamu diam saja', "*tusing dadi milu-milu*" 'tidak boleh ikut-ikutan' adalah bentuk linguistik yang mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap perempuan. Dengan fakta linguistik tersebut jelas tergambar bagaimana posisi perempuan pada masyarakat Bali. Hal itu merupakan bentuk ketidaksetaraan gender. Seperti yang disampaikan oleh Coates, 1986:vi) bahwa perbedaan linguistik merupakan suatu cerminan perbedaan sosial, dan selama masyarakat memandang laki-laki dan perempuan berbeda dan tidak setara maka perbedaan dalam bahasa laki-laki dan perempuan akan terus ada.

Data (3) *Ah..Ibu tusing bisa mutusin, Ibu ngudiang, ento ada Bapak, depang Bapak dogen ane mutusin.* Tuturan ini muncul dalam konteks peminangan ketika seorang ibu diminta persetujuannya ketika putrinya dipinang. Di sini terlihat bagamian seorang perempuan sangat tergantung pada suaminya dalam memutuskan sesuatu. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender juga diciptakan oleh perempuan itu sendiri. Begitu juga dengan data (4) yang merasa dirinya sebagai pendatang (*tiang nak neka*) sehingga tidak berani ikut dalam memberikan keputusan terhadap banyak hal dalam rumah tangganya. Terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut, tentu perempuan harus berani mengajukan pendapat sepanjang pendapat dan masukan itu konstruktif. Di sini terlihat hambatan kesetaraan gender sebenarnya juga muncul dari perempuan itu sendiri.

Data (5) *Ngoyong gen jumlah, panake runguang, de be misi megae;* merupakan tuturan yang sering terdengar di masyarakat Bali berkaitan dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga ingin bekerja. Namun, keinginannya tidak terwujud karena suami dan pihak keluarga suaminya melarang dengan alasan agar fokus merawat anak. Wacana ini sebenarnya menghambat kesetaraan gender karena tidak memberi kesempatan kepada

perempuan untuk berkembang dalam hal ini bekerja. Secara linguistik, struktur kalimat yang diungkapkan seperti data (5) merupakan bentuk direktif "*ngoyong gen jumah*" 'diam di rumah saja'. Struktur mikro berupa struktur kalimat tersebut dapat merefleksikan konteks makro berupa struktur sosial budaya masyarakat yang menempatkan perempuan dalam kegiatan sektor domestik yaitu urusan rumah tangga.

Data (6) *Banggiang lanang-lanange ngajeng dumum, irage luh-luhe durian*. Konteks tuturan ini ketika pada acara upacara adat dan ada makan bersama dan diucapkan oleh seorang ibu yang dibenarkan oleh ibu-ibu yang lain. Apa makna tuturan ini? Perempuan sendiri mengutamakan laki-laki dan menempatkan dirinya setelah laki-laki. Dalam konteks kesetaraan gender peran laki-laki dan perempuan setara sehingga tidak ada jenis kelamin yang lebih dominan dari yang lainnya.

Dari analisis data yang telah diuraikan terhadap wacana-wacana yang menghambat kesetaraan gender, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk linguistik yang menjadi ciri wacana perempuan dan wacana yang ditujukan untuk perempuan sebagai berikut.

Tabel 3. Karakteristik Linguistik Wacana Perempuan Bali

No.	Bentuk Linguistik	Makna
1.	<i>awak luh, anak luh</i>	Kamu perempuan
2.	<i>Sie pang ibane</i>	Diam saja
3.	<i>Sing dadi milu-milu</i>	Tidak boleh ikut-ikutan
4.	<i>Tusing bisa mutusin</i>	Tidak bisa memutuskan
5.	<i>Tiang nak neka</i>	Saya pendatang
6.	<i>Ngoyong jumah</i>	Diam di rumah
7.	<i>Panake runguang</i>	Mengurus anak
8.	<i>Luh-luhe durian</i>	Perempuan belakangan
9.	<i>De megae</i>	Jangan bekerja
10.	<i>Paon</i>	Dapur
11.	<i>Peken</i>	Pasar

Tabel 3 menunjukkan fakta-fakta linguistik (bahasa) dalam wacana yang menghambat kesetaraan gender dalam masyarakat Bali. Fakta linguistik tersebut mengandung makna dan

merefleksikan hal-hal sebagai berikut; (1) perempuan harus sadar diri sebagai perempuan; (2) perempuan tidak boleh berbicara; (3) perempuan tidak boleh ikut campur dalam memutuskan sesuatu; (4) perempuan adalah pendatang di keluarga laki-laki; (5) perempuan sebaiknya di rumah saja mengurus anak; (6) kesempatan perempuan adalah setelah laki-laki; (7) ruang lingkup perempuan di sektor domestik seperti dapur, rumah tangga; (8) perempuan jangan bekerja di sektor publik; (9) perempuan jangan bersekolah tinggi-tinggi; mungkin banyak lagi yang direfleksikan oleh fakta linguistik ketika diteliti lebih dalam lagi.

Di sinilah terlihat secara linguistik kultural bahwa ada makna tersembunyi di balik pemakaian bahasa yang merefleksikan struktur sosial dan budaya masyarakat Bali serta wacana sebagai struktur mikro merupakan gambaran dari struktur makro masyarakatnya. Dengan memahami bahasa sebagai fakta sosial dapat dengan mudah dipahami struktur budaya masyarakat Bali secara umum. Hal yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Bali memosisikan perempuan dan bagaimana perempuan memosisikan dirinya.

Secara umum kita bisa melihat hubungan antara bahasa dan gender yaitu bahasa mencerminkan pembagian dan ketidaksetaraan; posisi pembagian dan ketidaksetaraan itu sebenarnya tercipta melalui perilaku linguistik yang seksis; dan pandangan yang mengemukakan bahwa kedua proses tersebut berjalan dan bahwa segala penjelasan penuh mengenai bahasa dan gender haruslah mengeksplorasi perseteruan dan saling berpengaruh antara keduanya (Gradol & Swann, 1989:12).

Simpulan

Dari uraian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa wacana-wacana yang menghambat kesetaraan gender pada masyarakat Bali sampai saat ini masih ada dan dianggap sebagai suatu ungkapan tanpa masalah. Padahal, pada dasarnya wacana-wacana tersebut sarat dengan ketidaksetaraan gender. Wacana sebagai fakta linguistik atau fakta bahasa merupakan cermin dari struktur sosial dan budaya masyarakat Bali secara umum. Dalam wacana yang diucapkan baik oleh perempuan maupun

oleh masyarakat secara umum mengandung muatan-muatan budaya dan makna tersembunyi yang merefleksikan sistem budaya masyarakat Bali. Fakta linguistik yang terkandung dalam wacana tersebut merefleksikan ketidaksetaraan gender dalam hal pemerolehan pendidikan untuk perempuan, pengambilan keputusan, beraktivitas di sektor publik, dalam hal eksistensi diri dan sebagainya.

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat Bali tentu wacana-wacana yang menghambat kesetaraan gender seharusnya diperhatikan agar tidak menjadi semacam ungkapan yang diterima begitu saja. Jalan panjang dalam mencapai kesetaraan gender akan tercapai bila masyarakat juga peduli terhadap hal-hal seperti. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dalam segala aspek. Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol segala aktivitas baik domestik maupun publik, serta memperoleh perlakuan dan manfaat yang setara dan adil dalam konteks sosial budaya. Di samping itu, secara lebih luas, memiliki akses dan partisipasi yang sama berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

Daftar Pustaka

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriaki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan kesetaraan Gender"; *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 5, No.1, April, pp 754 – 769.
- Bonvillain, Nancy. 2003. *Language, Culture, and Communication. The Meaning of Messages*. New Jersey : Prentice Hall.
- Crystall, David. 1985. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford ; Basil Blackwell.
- Faqih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*. New York : Longman
- Foucault, M. 1982. *Archeology of Knowledge and The Discourse of Language*. New York : Patheon Books.
- Gradol, David & Joan Swann. 1989. *Gender Voice*. Oxford : Basil Blackwell
- Hasan, Nur & Robby M. 2014. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali : Studi fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, No.2, Oktober, pp. 149–162.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntjara, Esther. 2012. *Gender, Bahasa, & Kekuasaan*. Jakarta : Libri Mills, S. 1997. *Discourse*. London. Routledge.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Palmer, G.B. 1996. *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. Austin : University of Texas Press.
- Parmiti, Desak Putu. 2017. " Kesetaraan Gender dan Pergulatan Status Sosial Wanita Bali dan Konstelasi Politik Praktis", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora*, Vol 1, No.2, Oktober, pp 51–56
- Rahmawati, Ni Nyoman. 2016. "Perempuan Bali dalam pergulatan Gender : Kajian Budaya, Tradisi dan Agama Hindu" *Jurnal Studi Kultural*, Vol.1, No. 1 Januari, pp 56–64.
- Rais, Wakti. A. 2017. *Kearifan Lokal dalam Bahasa dan Budaya Jawa*. Surakarta : UNS Press.
- Sartini, Ni Wayan. 2020. "Ekspresi Verbal Masyarakat Bali Terhadap Kelahiran Bayi : Kajian Linguistik Kebudayaan", *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 10, No. 02, Oktober, pp395–416.
- Sharifian, Farzad. 2011. *Cultural Linguistics*. London & New York: Routledge